

LAMPUNG BARAT



RENJA TAHUN 2025

2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KATA PENGANTAR

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka *good governance* tersebut dan sejalan dengan cita-cita reformasi bangsa, dituntut suatu pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu indikator yang merupakan cerminan suatu pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme adalah bagaimana pemerintahan tersebut melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara bertanggung jawab dan transparan.

Kegiatan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja - OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 ini dimaksudkan selain dari pemenuhan kewajiban sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, juga dimaksudkan menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam rangka penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Keberhasilan akan seluruh Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya akan terwujud bila seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Atas jasa, bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam penyusunan Renja – OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kami mengucapkan terima kasih. Akhirnya, semoga penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 ini dapat bermanfaat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Undang – Undang ini selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Didalam peraturan ini disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja atau Renja OPD.

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja OPD disusun dengan mengacu pada :

- Rencana program prioritas pada Rancangan Awal RKPD untuk perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif,
- Renstra SKPD dalam perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi dan prakiraan maju;
- Dan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan periode sebelumnya.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas dan untuk menjawab hasil penjangkaran aspirasi masyarakat yang disalurkan lewat Forum SKPD serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

Renja Disdukcapil 2025

Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kinerja seluruh OPD di daerah yang bersangkutan. Rencana Kinerja (Renja) OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat akan digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menentukan skala prioritas yang selanjutnya akan dijabarkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Dengan demikian Penyusunan Rencana Kinerja OPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi sangat penting sebagai pedoman kerja dinas agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat lebih terarah dan terukur.

Lebih Lanjut perumusan Renja OPD merupakan dokumen tahunan sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai selanjutnya dituangkan dalam Dokumen perencanaan yang lebih konkret dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja OPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5657)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008;
 12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Administrasi Kependudukan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Kabupaten Lampung Barat.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Lampung Barat tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 19. Peraturan Bupati No 46 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Capil kabupaten Lampung Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disusun berdasarkan pada penjabaran program yang terdapat dalam RPJMD tahun 2023-2026 sebagai dokumen perencanaan yang bersumber dari berbagai aspirasi yang ada.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini disusun dengan maksud:

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025;
2. Untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan
3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renja ini adalah :

- a. Menetapkan program dan kegiatan organisasi yang sejalan dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar kegiatan pembangunan menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, mudah dipantau serta mudah diukur pencapaian hasilnya.

- b. Menetapkan indikator kinerja dan evaluasi serta analisis kinerja OPD agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangan dan hambatannya sehingga dapat ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya;
- c. Sebagai salah satu indikator di dalam evaluasi kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah Kabupaten Lampung Barat;
- d. Sebagai salah satu bagian dari tindak lanjut pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini disusun ke dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN II

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan subkegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin setelah perubahan sebanyak 5 Program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin setelah perubahan sebanyak 11 kegiatan, jumlah subkegiatan termasuk subkegiatan rutin setelah perubahan sebanyak 31 subkegiatan. Alokasi dana Tahun 2023 untuk Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp. 4.208.945.051,- terealisasi sebesar Rp. 4.113.206.368,- atau 97,73 persen.

Dari seluruh sub kegiatan yaitu sebanyak 31 subkegiatan realisasi fisik atau kinerja keluarannya mencapai 100 persen. Adapun untuk realisasi keuangannya ada beberapa sub kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 90% diantaranya :

1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi sebesar 76 % dikarenakan pengeluaran di sesuaikan dengan real cost dan bukti pembayaran pada Listrik, air dan Speedy, akan tetapi untuk capaian kinerja kegiatan ini tercapai 100%
2. Subkegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terealisasi sebesar 85 % dikarenakan pada rekening honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, hanya terealisasi selama 5 bulan, dikarenakan adanya anjuran bahwa honor-honor selain bendahara pengeluaran dihapuskan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lampung Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja, dan tingkat pencapaian sasaran instansi yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Kriteria Capaian hasil Pengukuran Kinerja dengan klarifikasi/rentang dapat terlihat dalam table sebagai berikut :

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	85 % - > 100 %	Sangat
2.	70 % - 85 %	Berhasil
3.	55 % - 70 %	Berhasil
4.	< 55 %	Cukup Berhasil Tidak Berhasil

Hasil Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 dapat terlihat dalam table berikut ini :

Tabel 2.1

Hasil Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET	REALISASI BERDASARKAN KONDISI REAL	%
1	2	3	4		5	
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah kepemilikan dokumen pendaftaran Penduduk (KTP dan KIA)+ Jumlah Kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akta Kelahiran 0-18 tahun) di bagi 2 x 100%	92,1%	102,05%	
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase peningkatan stakholder yang mendapatkan hak akses pemanfaatan data	Jumlah Stakeholder yang mendapatkan hak akses pemanfaatan data s.d Tahun ini di bagi target selama 4 tahun x 100%	47,05%	41,17%	

Tabel 2.2

Sasaran Dan Indikator Sasaran serta Formulasi Perhitungan Target Untuk Kepala Bidang (Eselon III)

Nama Bidang	Nama Program Kegiatan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target	Realisasi
Bidang pelayanan Pendaftaran penduduk	Program pelayanan Pendaftaran penduduk	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	$\frac{\text{Jumlah Wajib KTP yang sudah Rekam} + \text{jumlah kepemilikan}}{\text{jumlah wajib KTP}}$	95,09%	104,28 %
Bidang Pelayanan Pencatatan sipil	Program pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya pelayanan administrasi Pencatatan sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah yang mempunyai akta kelahiran 0-18}}{\text{dibagi jumlah anak usia 0-18 Tahun di kali 100\%}}$	97%	99,87 %
Bidang PIAK dan Bid. Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya data kependudukan yang valid	Persentase kenaikan jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah kerjasama pemanfaatan data s.d tahun ini}}{\text{jumlah target dalam 4 tahun}} \times 100\%$	40%	55%
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Program Penyusunan Profil Kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase profil kependudukan Kabupaten Lampung Barat	$\frac{\text{Jumlah Data perkembangan kependudukan yang di hitung sesuai dengan data konsolisadi di bagi dengan}}{\text{Jumlah data perkembangan penduduk di kali 100\%}}$	100%	100%

Diharapkan di masa yang akan datang semua kegiatan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik serta tetap memperhatikan unsur-unsur efektif dan efisien.

DATA PENCAPAIAN PEMBANGUNAN

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 (Data DKB semester 1 2023)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Lk	Pr	Jumlah
1	Balik Bukit	22.226	21.018	43.244
2	Sumber Jaya	12.564	11.719	24.283
3	Belalau	6.550	6.076	12.626
4	Way Tenong	17.823	17.181	35.004
5	Sekincau	9.931	9.171	19.102
6	Suoh	9.862	8.910	18.772
7	Batu Brak	7.929	7.331	15.260
8	Sukau	13.204	12.407	25.611
9	Gedung Surian	8.906	8.371	17.277
10	Kebun Tebu	10.848	10.400	21.248
11	Air Hitam	6.562	5.929	12.491
12	Pagar Dewa	9.034	7.980	17.014
13	Batu Ketulis	7.186	6.489	1.3675
14	Lumbok Seminung	4.483	3.966	8.449
15	Bandar Negeri Suoh	13.506	11.992	25.498
	Jumlah	160.614	148.940	309.554

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi OPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kepengurusan dan kesadaran untuk melaporkan peristiwa kependudukan.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya data kependudukan
3. Masih kurangnya bimbingan teknis SDM bagi operator agar terwujud kualitas Pengetahuan Aparatur Pelayanan Administrasi Kependudukan
4. Perlu dilaksanakannya monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan guna terciptanya data penduduk yang valid
5. Masih tingginya jumlah Kartu Keluarga (KK) yang data perseorangannya yang kurang dinamis/*ter update*
6. Pelayanan Cepat tanpa pungli

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

Indikator Kinerja merupakan suatu alat bagi manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan kinerja yang dicapai selama ini atau dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran kinerja organisasi merupakan jembatan perencanaan strategis dan akuntabilitas dari suatu instansi/unit kerja. Keberhasilan pengukuran kinerja sangat ditentukan oleh ketepatan indikator kinerja yang digunakan.

Sedangkan capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 berdasarkan sasaran strategis yaitu:

1. Sasaran Strategis 1

“Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan”

Indikator dari sasaran strategis ini adalah “Persentase

kepemilikan dokumen kependudukan”

Dokumen Kependudukan yang dihitung disini adalah Cakupan kepemilikan KTP el dan Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak dan Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran 0-18 Tahun, dikarenakan cakupan-cakupan tersebut juga merupakan target nasional.

Adapun perhitungan target pada sasaran strategis 1 tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Jumlah Dokumen Cakupan dokumen Kependudukan + Jumlah dokumen Pencatatan Sipil di bagi 2 dikalikan dengan 100%

=
$$\frac{(\text{Jumlah Wajib KTP yang sudah rekam} + \text{Jumlah Kepemilikan KIA}) + \text{Kepemilikan Akta kelahiran (0-18 tahun)}}{2} \times 100\%$$

$$= \frac{104,24 + 99,87}{2} \times 100\%$$

$$= 102,055$$

2. Sasaran II, Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan dengan indikator

Persentase peningkatan stakeholder yang mendapatkan hak akses data

Sasaran strategis ke 2 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah “Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan” dengan indikator Persentase peningkatan stakeholder yang mendapatkan hak akses data. Adapun perhitungan formulasinya adalah “ Jumlah Stakeholder yang mendapatkan hak akses data melalui perjanjian kerjasama s.d. Tahun ini dibagi target selama 4 tahun” (Target selama 4 tahun adalah 17 OPD atau *Stakeholder* , data awal yaitu 5 OPD + target selama 4 tahun yang setiap tahunnya 3 OPD/ *Stakeholder*. Pada tahun 2023 target pada sasaran ini adalah sebesar 47,05% tetapi dari target yang ditentukan hanya 41,17 % yang dapat tercapai atau sekitar 87,5%, berikut hal-hal yang dapat kami sampaikan :

1. Kondisi awal sebelum penentuan target ada 5 OPD pemanfaatan Data kependudukan dengan perjanjian kerjasama yaitu :
 1. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat
 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat
 3. Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat
 4. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat
 5. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat
2. Adapun 2 penambahan *stakeholder* yang telah melakukan perjanjian kerjasama yaitu :
 1. Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat
 2. Pekon watas Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

Dua pekon tersebut telah melaksanakan perjanjian kerjasama, akan tetapi dikarenakan adanya arahan arahan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemernterian Dalam Negeri, bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama untuk saat ini lebih diutamakan dilakukan dengan perangkat daerah pada Instansi Pemerintah Daerah, oleh karena itu perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Pekon Trimulyo dan Pekon Watas untuk sementara ditunda pelaksanaannya.

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat telah mengajukan usul perjanjian kerjasama kepada Direktorat Jenderal Dukcapil Kemernterian Dalam Negeri terkait akses pemanfaatan data kependudukan terhadap 3 perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan 5 Pekon atau kelurahan (pekon/kelurahan yang termasuk dalam desa *smart village*) diwilayah Kabupaten Lampung Barat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabuoaten Lapung Barat.
 - b. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Barat.

- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat.
- d. Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.
- e. Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.
- f. Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.
- g. Pekon Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.
- h. Pekon Giham Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

4. Terkait pengajuan usul kerjasama sebagaimana dimaksud pada poin 4, bahwa dari 3 perangkat daerah dan 5 pekon tersebut, hanya 1 perangkat daerah saja yang sampai saat ini masih dalam menuju proses kerjasama, yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Barat, sedangkan pengajuan lainnya belum disetujui oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan penjelasannya ada dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Uraian Proses Kerjasama

No	Nama OPD/Desa/Kelurahan	Uraian/proses
1	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Barat	Pengajuan kerjasama ke kemendagri, di setujui, kemudian Disdukcapil Kab Lampung Barat membuat draf Perjanjian kerjasama, dan pada saat ini masih dalam proses menuju perjanjian kerjasama
2	Dinas Pengendalian Penduduk KB, PP dan PA Kabupaten Lampung Barat.	Pengajuan kerjasama ke kemendagri, tetapi tidak di setujui karena belum jelasnya tujuan dan data balikan pemanfaatan data kependudukan
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Pengajuan kerjasama ke kemendagri, di setujui, kemudian Disdukcapil Kab

	Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat	Lampung Barat membuat draf Perjanjian kerjasama, akan tetapi BKPSDM Kabupaten Lampung Barat mengajukan kembali penambahan elemen data pemanfaatan data kependudukan yaitu nama pasangan, namun pengajuan penambahan elemen data tersebut tidak mendapat persetujuan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. Dikarenakan penambahan akses elemen data nama pasangan belum dapat dilakukan, maka BKPSDM masih mempertimbangkan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan tersebut, sehingga prosesnya belum sampai pada penandatanganan Perjanjian Kerja sama
4	Kecamatan Sekincau	Pengajuan kerjasama ke kemendagri, tidak di setujui.
5	Pekon Pampangan	Pengajuan kerjasama ke kemendagri, tidak di setujui.
6	Pekon Suka maju	Pengajuan kerjasama ke kemendagri, tidak di setujui.
7	Pekon Tiga Jaya	Pengajuan kerjasama ke kemendagri, tidak di setujui.
8	Pekon Giham Waspada	Pengajuan kerjasama ke kemendagri, tidak di setujui.

Target kami pada tahun 2023 adalah 47,05 % atau 3 OPD/ stakeholder yang mendapatkan hak akses data pada tahun ini Jadi Perhitungan pada tahun ini adalah

= $\frac{\text{Jumlah Stakholder yang mendapatkan hak akses data melalui perjanjian kerjasama pemanfaatan data sampai dengan tahun ini x}}{100\%}$

17 (target selama 4 tahun)

= $\frac{5 \text{ (data awal)} + 2 \text{ (capaian)}}{17}$

17

= 41,17% atau 87,5% dari target yang diperjanjikan

Renja Disdukcapil 2025

Pada tahun berikutnya perjanjian kerjasama ini diupayakan dapat terealisasi dengan baik sehingga bukan hanya target kami saja yang tercapai tetapi lebih kepada manfaat dari perjanjian kerja sama itu sendiri yang dapat memudahkan stakholder pengguna data kependudukan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan wadah penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah atau yang ddikenal dengan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Musrenbang tersebut merupakan upaya memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 taun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. “Amanat tersebut dengan menyelesaikan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Lampung Barat tahun 2023-2026, Menyelenggarakan Musrenbang kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten Lampung Barat.

Musrenbang sebagai forum antar pelaku pembangunan menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah akan berfungsi menghasilkan kesepakatan antar pelaku mengenai RKPD yang dititik beratkan pada pembahasan mensinkronisasikan rencana kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dan antar pemerintah daerah sebagai pengusung rancangan rencana kerja OPD dengan masyarakat yang mengusulkan prioritas hasil musrenbang kecamatan.

- a. Data usulan dari kecamatan yang difasilitasi dengan kegiatan Musrenbang Kecamatan
- b. Data usulan dari OPD yang tertuang dalam RENJA awal OPD
- c. Data MUSRENBANG Tingkat Kabupaten Lampung Barat, yaitu hasil dari Forum Gabungan OPD dimana usulan Kecamatan dan usulan OPD di kompilasi menghasilkan kesepakatan baru yang difasilitasi dalam kegiatan MUSRENBANG
- d. Renja akhir OPD merupakan hasil dari Musrenbang tingkat kabupaten Lampung Barat yang sudah mempunyai kode rekening yang akan dilanjutkan untuk proses RKPD dengan memperhatikan pagu indikatif.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 sebagai tahapan akhir dari RPJPN 2005-2025 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia Tahun 2045 yaitu Indonesia Maju. Hal ini diindikasikan dengan kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Pada tahun 2024 merupakan tahun mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun pematangan pemulihan ekonomi. Adapun Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan public

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan

Tujuan organisasi pada dasarnya jangka panjang, yang harus diselesaikan selama waktu itu, dan akan mengarahkan kinerja tahunan organisasi. Tujuan mencerminkan pernyataan kondisi yang diinginkan dan bukan merupakan proses atau aktivitas.

Untuk merealisasikan pelaksanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, perlu ditetapkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Lampung Barat (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program SKPD secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicator) yang terukur.

Adapun tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Kabupaten Lampung Barat adalah :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan”

Sasaran

Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan atau penyempurnaan yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan dengan berhasil.

Sasaran yang baik melalui rumusan berorientasi pada kegiatan (action oriented) yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Sasaran ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Sasaran juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (Specific), terukur (Measurable), dapat dicapai (Attainable), nyata (Realistic) dan tepat waktu (Time Bound). Penentuan sasaran strategis yang tepat dan terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang

sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya, serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu jangka menengah 4 tahun sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan
2. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan

Adapun tujuan dan sasaran serta target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat juga dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Jangka Menengah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target kinerja sasaran pada tahun ke			
			2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Admindex	70,25	75,50	80,50	85,25

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada tahun-			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	92,10%	102,15%	102,25%	102,50%
2		Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Peningkatan Stakeholder yang mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan dari kemendagri	47,05%	64,70%	82,35%	100%

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Renstra 2023-2026, maka program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 antara lain :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi kinerja perangkat daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Program Pendaftaran Penduduk

Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan :

1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
2. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
3. Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan

Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai kebutuhan

Program Pencatatan Sipil

Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil

Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan :

1. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa penting terkait pencatatan sipil
2. Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
3. Sosialisasi terkait pencatatan sipil

Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan sipil

Sub Kegiatan :

1. Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Sub Kegiatan

1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
2. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan

Sub Kegiatan

1. Sosialisasi penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
2. Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan

Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sub Kegiatan :

1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Kegiatan : Pengumpulan Profil Kependudukan

Sub Kegiatan

1. Penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

I. Rencana Kerja

1.1. Program

Untuk Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat 7 Program Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pendaftaran Penduduk
 - Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
 - Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pencatatan dan Penyajian Database Kependudukan

- Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

- Kegiatan penyusunan profil kependudukan

1.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Pendanaan Indikatif merupakan perspektif anggaran dengan strategi kesiapan input pendanaan yang bertujuan menyediakan dukungan finansial yang mencukupi dengan alat pengukur strategis.

Dana indikatif yang diperlukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 8.622.218.000,- (delapan milyar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).

BAB IV

PENUTUP

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, oleh karenanya segala konsekwensi yang terjadi harus menjadi tanggungjawab bersama. Terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan.

Demikianlah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 ini disusun, selain sebagai pedoman dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi, Rencana Kerja ini juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Agar Rencana Kerja ini dapat mendatangkan manfaat bagi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perlu dioperasionalkan dan dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi dan konsisten yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

Keberhasilan akan seluruh Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat hanya akan terwujud bila seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Liwa, 23 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



RUSPAN ANWAR, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19661220 199303 1 007

LAMPIRAN 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Lampung Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

No	Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra)s.d Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKP (Renja) Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKP (Renja) yang dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP (Renja) yang dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (Renja) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP (Renja) s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD (Renstra) s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
2. 12 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	80,50 %	20,852,595,800	80,90 %	3,148,890,551	79,50 %	3,473,857,450	79,50 %	3,473,857,450	79,50 %	1	0						
2. 12 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38 Dokumen	46,410,000	11 Dokumen	4,698,000	8 Dokumen	5,372,000	8 Dokumen	5,372,000	100	19 Dokumen	10,070,000	50	21,70	Disudicapil			
			Jumlah dokumen penganggaran daerah yang di susun	20 Dokumen	31,094,700	5 Dokumen	5,781,000	5 Dokumen	5,781,000	5 Dokumen	5,781,000	100	10 Dokumen	11,562,000	50	37,18	Disudicapil			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 Laporan	46,410,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	100	24 Laporan	10,000,000	50	21,55	Disudicapil			
2. 12 01 2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38 Dokumen	46,410,000	11 Dokumen	4,698,000	8 Dokumen	5,372,000	8 Dokumen	5,372,000	100	19 Dokumen	10,070,000	50	21,70	Disudicapil			
2. 12 01 2.01 02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4,641,000	1 Dokumen	820,000	1 Dokumen	820,000	1 Dokumen	820,000	100	2 Dokumen	1,640,000	50	35,34	Disudicapil			
2. 12 01 2.01 03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	4,641,000	1 Dokumen	695,000	1 Dokumen	695,000	1 Dokumen	695,000	100	2 Dokumen	1,390,000	50	29,95	Disudicapil			
2. 12 01 2.01 04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	5,105,100	1 Dokumen	968,000	1 Dokumen	968,000	1 Dokumen	968,000	100	2 Dokumen	1,936,000	50	37,92	Disudicapil			
2. 12 01 2.01 05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumePerubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	5,105,100	1 Dokumen	798,000	1 Dokumen	798,000	1 Dokumen	798,000	100	2 Dokumen	1,596,000	50	31,26	Disudicapil			
2. 12 01 2.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	4 Dokumen	11,602,500	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	100	2 Dokumen	5,000,000	50	43,09	Disudicapil			
2. 12 01 2.01 07		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	48 Dokumen	46,410,000	12 Dokumen	5,000,000	12 Dokumen	5,000,000	12 Dokumen	5,000,000	100	24 Dokumen	10,000,000	50	21,55	Disudicapil			
2. 12 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 orang	14,851,200,000	28 orang	2,828,264,081	28 orang	3,017,485,800	28 orang	3,017,485,800	100	56 orang	5,845,749,881	200	39,36	Disudicapil			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	13,923,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	100	2 Dokumen	5,000,000	50	35,91	Disudicapil			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Dokumen	9,282,000	2 Dokumen	1,000,000	2 Dokumen	1,000,000	2 Dokumen	1,000,000	100	4 Dokumen	2,000,000	50	21,55	Disudicapil			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 Dokumen	11,602,500	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,000,000	100	4 Dokumen	4,000,000	50	34,48	Disudicapil			
2. 12 01 2.02 01		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 ASN	14,851,200,000	28 ASN	2,828,264,081	28 orang	3,017,485,800	28 ASN	3,017,485,800	100	56 ASN	5,845,749,881	200	39,36	Disudicapil			
2. 12 01 2.02 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	13,923,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	100	2 Dokumen	5,000,000	50	35,91	Disudicapil			
2. 12 01 2.02 07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Dokumen	9,282,000	2 Dokumen	1,000,000	2 Dokumen	1,000,000	2 Dokumen	1,000,000	100	4 Dokumen	2,000,000	50	21,55	Disudicapil			
2. 12 01 2.02 08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 Dokumen	11,602,500	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,000,000	100	4 Dokumen	4,000,000	50	34,48	Disudicapil			
2. 12 01 2.03		Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik SKPD	4	69,615,000	1	6,341,400	1 Dokumen	7,015,000	1	7,015,000	100	2	13,356,400	50	19,19	Disudicapil			
2. 12 01 2.03 01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik SKPD	4 Dokumen	69,615,000	1 Dokumen	6,341,400	1 Dokumen	7,015,000	1 Dokumen	7,015,000	100	2 Dokumen	13,356,400	50	19,19	Disudicapil			

2. 12 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen	69,615,000	1	Dokumen	7,882,800	1	Dokumen	8,556,000	1	Dokumen	8,556,000	100	Dokumen	100	2	Dokumen	16,438,800	50	Dokumen	23.61	Disdukcapil
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	Orang	116,025,000		Orang	-	2	Orang	20,000,000		Orang	20,000,000		Orang	100	2	Orang	#VALUE!	25	Orang	#VALUE!	Disdukcapil
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	120	Orang	162,435,000		Orang	-	30	Orang			Orang	-		Orang	0	0	Orang		0	Orang	0.00	Disdukcapil
2. 12 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen	69,615,000	1	Dokumen	7,882,800	1	Dokumen	8,556,000	1	Dokumen	8,556,000	100	Dokumen	100	2	Dokumen	16,438,800	50	Dokumen	23.61	Disdukcapil
2. 12 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	Orang	116,025,000		Orang	-	2	Orang	20,000,000		Orang	20,000,000	100	Orang	100	2	Orang	20,000,000	25	Orang	17.24	Disdukcapil
2. 12 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	120	Orang	162,435,000		Orang	-		Orang	-		Orang	-		Orang	0	0	Orang	-	0	Orang	0.00	Disdukcapil
2. 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	4	paket	27,846,000	1	paket	3,648,400	1	paket	3,648,400	1	paket	3,648,400	100	paket	100	2	paket	7,296,800	50	paket	26.20	Disdukcapil
		Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	paket	812,175,000		paket	-		paket	-		paket	-		paket	0	0	paket	-	0	paket	0.00	Disdukcapil
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	4	paket	152,640,000	1	paket	19,932,300	1	paket	22,920,000	1	paket	22,920,000	100	paket	100	2	paket	42,852,300	50	paket	28.07	Disdukcapil
		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	4	Dokumen	20,884,500	4	Dokumen	3,960,000	4	Dokumen	3,960,000		Dokumen	3,960,000		Dokumen	100	8	Dokumen	7,920,000	200	Dokumen	37.92	Disdukcapil
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	laporan	34,807,500	1	laporan	4,629,000	1	laporan	4,629,000	1	laporan	4,629,000	100	laporan	100	2	laporan	9,258,000	50	laporan	26.60	Disdukcapil
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	laporan	580,125,000	1	laporan	100,126,217	1	laporan	85,505,000	1	laporan	85,505,000	100	laporan	100	2	laporan	185,631,217	50	laporan	32.00	Disdukcapil
2. 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	4	paket	27,846,000	1	paket	3,648,400	1	paket	3,648,400	1	paket	3,648,400	100	paket	100	2	paket	7,296,800	50	paket	26.20	Disdukcapil
2. 12 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	paket	812,175,000		paket	-		paket	-		paket	-		paket	0	0	paket	-	0	paket	0.00	Disdukcapil
2. 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	4	paket	152,640,000	1	paket	19,932,300	1	paket	22,920,000	1	paket	22,920,000	100	paket	100	2	paket	42,852,300	50	paket	28.07	Disdukcapil
2. 12 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	4	Dokumen	20,884,500	4	Dokumen	3,960,000	4	Dokumen	3,960,000	4	Dokumen	3,960,000	100	Dokumen	100	8	Dokumen	7,920,000	200	Dokumen	37.92	Disdukcapil
2. 12 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	laporan	34,807,500	1	laporan	4,629,000	1	laporan	4,629,000	1	laporan	4,629,000	100	laporan	100	2	laporan	9,258,000	50	laporan	26.60	Disdukcapil
2. 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	laporan	580,125,000	1	laporan	100,126,217	1	laporan	85,505,000	1	laporan	85,505,000	100	laporan	100	2	laporan	185,631,217	50	laporan	32.00	Disdukcapil
2. 12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		Unit	1,299,480,000		Unit	-	17	Unit	37,600,000	17	Unit	37,600,000	100	Unit	100	17	Unit	37,600,000		Unit	2.89	Disdukcapil
2. 12 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		unit	348,075,000		unit	-		unit	-		unit	-		unit	0	0	unit	-		unit	0.00	Disdukcapil
2. 12 01 2.07 05	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60	unit	255,255,000		unit	-	15	unit	11,600,000	15	unit	11,600,000	100	unit	100	15	unit	11,600,000	25	unit	4.54	Disdukcapil
2. 12 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	unit	348,075,000		unit	-	2	unit	26,000,000	2	unit	26,000,000	100	unit	100	2	unit	26,000,000	13.3333333	unit	7.47	Disdukcapil
2. 12 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30	unit	348,075,000		unit	-		unit	-		unit	-		unit	0	0	unit	-		unit	0.00	Disdukcapil
2. 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan	21,348,600	1	laporan	2,000,000	1	laporan	2,000,000	1	laporan	2,000,000	100	laporan	100	2	laporan	4,000,000	50	laporan	18.74	Disdukcapil
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	laporan	335,177,000	1	laporan	34,221,078	1	laporan	40,975,000	1	laporan	40,975,000	100	laporan	100	2	laporan	75,196,078	50	laporan	22.43	Disdukcapil
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	laporan	701,790,000	1	laporan	47,897,900	1	laporan	47,796,900	1	laporan	47,796,900	100	laporan	100	2	laporan	95,694,800	50	laporan	13.64	Disdukcapil
2. 12 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan	21,348,600	1	laporan	2,000,000	1	laporan	2,000,000	1	laporan	2,000,000	100	laporan	100	2	laporan	4,000,000	50	laporan	18.74	Disdukcapil
2. 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	laporan	335,177,000	1	laporan	34,221,078	1	laporan	40,975,000	1	laporan	40,975,000	100	laporan	100	2	laporan	75,196,078	50	laporan	22.43	Disdukcapil

2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	laporan	701,790,000	1	laporan	47,897,900	1	laporan	47,796,900	1	laporan	47,796,900	100	laporan	100	2	laporan	95,694,800	50	laporan	13.64	Disdukcapil	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		unit	1,438,710,000		unit	7	unit	113,897,950		unit	113,897,950		unit	100		7	unit	113,897,950		unit	7.92	Disdukcapil	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	unit	510,510,000	4	unit	59,208,725	4	unit	94,098,300		unit	94,098,300		unit	100		8	unit	153,307,025	200	unit	30.03	Disdukcapil
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	unit	116,025,000	3	unit	9,799,650	3	unit	9,799,650		unit	9,799,650		unit	100		6	unit	19,599,300	30	unit	16.89	Disdukcapil
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	696,150,000		unit			unit	-		unit	-		unit		0	unit	-	0	unit	0.00	Disdukcapil	
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	unit	116,025,000		unit			unit	10,000,000		unit	10,000,000		unit	100		0	unit	10,000,000	0	unit	8.62	Disdukcapil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	90.70	%	6,195,735,000	80.90	%	764,429,947	79.50	%	773,145,000	79.50	%	773,145,000	#VALUE!	%	100	#VALUE!	%	1,537,574,947	#VALUE!	%	24.82	Disdukcapil	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4	Dokumen	3,480,750,000	1	Dokumen	613,835,497	1	Dokumen	613,992,000		Dokumen	613,992,000		Dokumen	100		2	Dokumen	1,227,827,497	50	Dokumen	35.27	Disdukcapil
		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4	laporan	997,815,000	1	laporan	129,169,450	1	laporan	118,116,000		laporan	118,116,000		laporan	100		2	laporan	247,285,450	50	laporan	24.78	Disdukcapil
		Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	8	laporan	348,075,000	2	laporan	21,425,000	2	laporan	41,037,000		laporan	41,037,000		laporan	100		4	laporan	62,462,000	50	laporan	17.94	Disdukcapil
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4	Dokumen	3,480,750,000	1	Dokumen	613,835,497	1	Dokumen	613,992,000		Dokumen	613,992,000		Dokumen	100		2	Dokumen	1,227,827,497	50	Dokumen	35.27	Disdukcapil
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4	laporan	997,815,000	1	laporan	129,169,450	1	laporan	118,116,000		laporan	118,116,000		laporan	100		2	laporan	247,285,450	50	laporan	24.78	Disdukcapil
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	8	laporan	248,075,000	2	laporan	21,425,000	2	laporan	41,037,000		laporan	41,037,000		laporan	100		4	laporan	62,462,000	50	laporan	25.18	Disdukcapil
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	4	Dokumen	1,160,250,000		Dokumen			Dokumen	-		Dokumen	-		Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen	0.00	Disdukcapil	
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	4	Dokumen	1,160,250,000		Dokumen			Dokumen	-		Dokumen	-		Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen	0.00	Disdukcapil	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	4	laporan	208,845,000		laporan			laporan	-		laporan	-		laporan		0	laporan	-	0	laporan	0.00	Disdukcapil	
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	4	laporan	208,845,000		laporan			laporan	-		laporan	-		laporan		0	laporan	-	0	laporan	0.00	Disdukcapil	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	100	%	3,095,547,000	99.87	%	93,769,000	98	%	134,096,000	98	%	134,096,000	100	100%	100	197.87	%	227,865,000	197.87	100%	7.36	Disdukcapil	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	4	Dokumen	580,125,000		Dokumen			Dokumen	-		Dokumen	-		Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen	0.00	Disdukcapil	
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	3	layanan	510,510,000		layanan		3	layanan	60,255,000		layanan	60,255,000		layanan	100		3	layanan	60,255,000	100	layanan	11.80	Disdukcapil
		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	4	Dokumen	148,512,000		Dokumen			Dokumen	-		Dokumen	-		Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen	0.00	Disdukcapil	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	4	Dokumen	580,125,000		Dokumen			Dokumen	-		Dokumen	-		Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen	0.00	Disdukcapil	

2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 layanan	510,510,000	layanan	3 layanan	60,255,000	3 layanan	60,255,000	100	layanan	100	3 layanan	60,255,000	100	layanan	11.80	Disdukcapil
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	4 Dokumen	148,512,000	Dokumen	Dokumen		Dokumen	-		Dokumen		0 Dokumen			Dokumen	0.00	Disdukcapil
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	4 laporan	162,435,000	laporan	laporan		laporan	-		laporan		0 laporan			laporan	0.00	Disdukcapil
		Jumlah Laporan Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	4 laporan	208,845,000	laporan	1 laporan	13,613,000	1 laporan	13,613,000	100	100	1 laporan	13,613,000	25		laporan	6.52	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	4 laporan	487,305,000	laporan	1 laporan	20,228,000	1 laporan	20,228,000	100	100	1 laporan	20,228,000	25		laporan	4.15	
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	4 laporan	394,485,000	laporan	laporan		laporan	-			0 laporan				laporan	0.00	Disdukcapil
2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	4 laporan	162,435,000	laporan	laporan		laporan	-		laporan		0 laporan			laporan	0.00	Disdukcapil
2.12.03.2.02.04	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	4 laporan	208,845,000	laporan	1 laporan	13,613,000	1 laporan	13,613,000	100	100	1 laporan	13,613,000	25		laporan	6.52	Disdukcapil
2.12.03.2.02.06	Fasilitas terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	4 laporan	487,305,000	laporan	1 laporan	20,228,000	1 laporan	20,228,000	100	100	1 laporan	20,228,000	25		laporan	4.15	Disdukcapil
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	4 laporan	394,485,000	laporan	laporan		laporan	-		laporan		0 laporan			laporan	0.00	Disdukcapil
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil bimbingan Teknis terkait Pencatatan sipil	laporan	603,330,000	laporan	93,769,000	1 laporan	40,000,000	1 laporan	40,000,000	100	100	1 laporan	133,769,000		laporan	22.17	Disdukcapil
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil bimbingan Teknis terkait Pencatatan sipil	4 laporan	603,330,000	1 laporan	93,769,000	1 laporan	40,000,000	1 laporan	40,000,000	100	100	2 laporan	133,769,000	50	laporan	22.17	Disdukcapil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kenaikan jumlah kerjasana pemanfaatan data kependudukan	100 %	2,297,295,000	55 %	56,329,600	60 %	58,914,100	60 %	58,914,100	100	100	115	115		%	5.02	Disdukcapil
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	4 laporan	208,845,000	1 laporan	23,370,000	1 laporan	23,370,000	1 laporan	23,370,000	100	100	2 laporan	46,740,000	50	laporan	22.38	Disdukcapil
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	162,435,000	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	100	Dokumen		1 Dokumen	-	25	Dokumen	0.00	Disdukcapil	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	4 laporan	208,845,000	1 laporan	23,370,000	laporan	23,370,000	laporan	23,370,000	100	100	1 laporan	46,740,000	25	laporan	22.38	Disdukcapil
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	162,435,000	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	-		Dokumen		0 Dokumen			Dokumen	0.00	Disdukcapil
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 laporan	92,820,000	laporan	laporan		laporan	-		laporan		0 laporan			laporan	0.00	Disdukcapil
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 laporan	348,075,000	laporan	laporan		laporan	-		laporan		0 laporan			laporan	0.00	Disdukcapil
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	255,255,000	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	-		Dokumen		0 Dokumen			Dokumen	0.00	Disdukcapil

			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	laporan	208,845,000	laporan		laporan	-	laporan	0	laporan	-	0	laporan	0.00	Disdukcapil				
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	4	Dokumen	324,870,000	Dokumen		Dokumen	-	Dokumen	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0.00	Disdukcapil				
			Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	4	Dokumen	301,665,000	1	Dokumen	11,600,000	1	Dokumen	13,700,000	1	Dokumen	13,700,000	100	2	Dokumen	25,300,000	50	8.39	Disdukcapil
2.12.04.2.03.02	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	laporan	92,820,000	laporan		laporan		laporan	-	laporan	0	laporan	-	0	laporan	0.00				
2.12.04.2.03.03	Facilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	laporan	348,075,000	laporan		laporan		laporan	-	laporan	0	laporan	-	0	laporan	0.00				
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4	Dokumen	255,255,000	Dokumen		Dokumen		Dokumen	-	Dokumen	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0.00				
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	laporan	208,845,000	laporan		laporan		laporan	-	laporan	0	laporan	-	0	laporan	0.00				
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	4	Dokumen	324,870,000	Dokumen		Dokumen		Dokumen	-	Dokumen	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0.00				
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	4	Dokumen	301,665,000	1	Dokumen	11,600,000	1	Dokumen	13,700,000	1	Dokumen	13,700,000	100	2	Dokumen	25,300,000	50	8.39		
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	laporan	278,460,000	1	laporan	21,359,600	1	laporan	21,844,100	1	laporan	21,844,100	100	2	laporan	43,203,700	50	15.52		
		Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4	laporan	116,025,000	laporan		laporan		laporan	-	laporan	0	laporan	-	0	laporan	0.00				
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	laporan	278,460,000	1	laporan	21,359,600		laporan	-	laporan	1	laporan	-	21,359,600	25	7.67				
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4	laporan	116,025,000	laporan		1	laporan	21,844,100	1	laporan	21,844,100	100	1	laporan	21,844,100	25	18.83			
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data Perkembangan Kependudukan yang sesuai dengan hasil konsolidasi kemendagri	100	%	301,665,000	100	%	22,522,000	100	%	24,323,700	100	%	24,323,700	100	100	%	46,845,700	100	15.53		
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	4	dokumen	301,665,000	1	dokumen	22,522,000	1	dokumen	24,323,700	1	dokumen	24,323,700	100	2	dokumen	46,845,700	50	15.53		
2.12.05.2.01.01	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	4	dokumen	301,665,000	1	dokumen	22,522,000	1	dokumen	24,323,700	1	dokumen	24,323,700	100	2	dokumen	46,845,700	50	15.53		
		UPT DISDUKCAPIL WAY TENONG													0							
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	4	Paket	33,000,000	1	Paket	3,300,000	1	Paket	3,480,000	1	Paket	3,480,000	100	2	Paket	6,780,000	50	20.55		
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	4	Paket	33,000,000	1	Paket	3,300,000	1	Paket	3,480,000	1	Paket	3,480,000	100	2	Paket	6,780,000	50	20.55		
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	115,000,000	1	Laporan	23,965,270	1	Laporan	16,540,000	1	Laporan	16,540,000	100	2	Laporan	40,505,270	50	35.22		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	180,000,000	1	Laporan	16,195,400	1	Laporan	16,195,400	1	Laporan	16,195,400	100	2	Laporan	16,195,400	50	9.00		

LAMPIRAN II
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Lampung Barat

Nama PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKP/ Renja Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP/ Renja Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip OPD	82,30 %	%	%	82,15 %	3,655,740,010	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	82,20 %	4,021,314,011	Disdukcapi
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	106 Dokumen	19 dokumen	19 dokumen	28 Dokumen	14,444,000	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	25 Dokumen	15,888,400	Disdukcapi
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38 Dokumen	8 dokumen	8 dokumen	11 Dokumen	5,648,000	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	8 Dokumen	6,212,800	Disdukcapi
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	820,000	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	1 Dokumen	902,000	Disdukcapi
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	695,000	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	1 Dokumen	764,500	Disdukcapi
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	968,000	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	1 Dokumen	1,064,800	Disdukcapi
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	798,000	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	1 Dokumen	877,800	Disdukcapi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	4 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	1 Dokumen	2,750,000	Disdukcapi
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 Dokumen	12 dokumen	1 dokumen	12 Dokumen	3,015,000	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	12 Dokumen	3,316,500	Disdukcapi
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	16 Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 Dokumen	3,153,366,110	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	4 Dokumen	3,468,702,721	Disdukcapi
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 ASN	28 ASN	28 ASN	28 ASN	3,147,866,110	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	28 ASN	3,462,652,721	Disdukcapi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	1 Dokumen	2,750,000	Disdukcapi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	1,000,000	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	2 Dokumen	1,100,000	Disdukcapi
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	8 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2,000,000	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	2 Dokumen	2,200,000	Disdukcapi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub organisasi yang di laksanakan administrasi umumnya	6 sub organisasi	6 sub	6 sub	6 sub organisasi	165,912,400	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	6 sub organisasi	182,503,640	Disdukcapi
	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	4 paket	11 jenis	12 jenis	1 paket	3,648,400	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	1 paket	4,013,240	Disdukcapi

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	8 paket	6 jenis	6 jenis	2 paket	31,775,000	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	2 paket	34,952,500	Disdukcapi
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	16 Dokumen	4 SKHU	4 SKHU	4 Dokumen	3,960,000	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	4 Dokumen	4,356,000	Disdukcapi
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	5 Sub organisasi	5 jenis	1 laporan	4,629,000	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	1 laporan	5,091,900	Disdukcapi
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 laporan	30 kali	37 kali	30 laporan	121,900,000	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	30 laporan	134,090,000	Disdukcapi
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	80 Unit	-	-	20 Unit	21,000,000	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	20 Unit	23,100,000	Disdukcapi
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 unit	-	-	10 unit	21,000,000	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	10 unit	23,100,000	Disdukcapi
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan urusan pemerintahan daerahnya	6 sub organisasi	6 Sub organisasi	6 Sub organisasi	6 sub organisasi	184,487,500	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	6 sub organisasi	202,936,250	Disdukcapi
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	1.037 surat	800 surat	1 laporan	2,000,000	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	1 laporan	2,200,000	Disdukcapi
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	7 rekening	8 rekening	1 laporan	57,100,000	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	1 laporan	62,810,000	Disdukcapi
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	6 Sub organisasi	6 Sub organisasi	1 laporan	125,387,500	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	1 laporan	137,926,250	Disdukcapi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	80 unit	80 unit	20 jenis	20 unit	116,530,000	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	20 unit	128,183,000	Disdukcapi
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	4 kendaraan	-	4 unit	102,490,000	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	4 unit	112,739,000	Disdukcapi
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	4 jenis	9 jenis	6 unit	14,040,000	Kecamatan Balik Bukit	DAU			Aparatur	6 unit	15,444,000	Disdukcapi
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase wajib KTP yang sudah rekam	90,70 %	95.48%	96.50%	89,65 %	1,138,812,000	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	89,95 %	1,252,693,200	Disdukcapi
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah produk pelayanan pendaftaran penduduk	16 produk	4 produk	4 produk	4 produk	846,568,000	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	4 produk	931,224,800	Disdukcapi
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	180000 Dokumen	56 orang	57 orang	45000 Dokumen	657,100,000	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	45000 Dokumen	722,810,000	Disdukcapi
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	48 laporan	15 kecamatan	-	12 laporan	126,891,000	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	12 laporan	139,580,100	Disdukcapi
	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	56 laporan	14 laporan	-	14 laporan	62,577,000	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	14 laporan	68,834,700	Disdukcapi
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	60000 Dokumen	-	-	15000 Dokumen	292,244,000	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	15000 Dokumen	321,468,400	Disdukcapi
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EI, Formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	60000 Dokumen	-	-	15000 Dokumen	292,244,000	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	15000 Dokumen	321,468,400	Disdukcapi
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	2026 1	106.64%	96%	2023 0.97	233,861,500	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	2024 0.98	257,247,650	Disdukcapi
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah masyarakat yang membuat akta	688388 Orang	11.824 akta	15000 akta	164.59 7 Orang	110,000,000	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	169.59 7 Orang	121,000,000	Disdukcapi
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	74 layanan	11.824 akta	-	15 layanan	110,000,000	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	17 layanan	121,000,000	Disdukcapi
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Produk Layanan Pencatatan Sipil yang diterbitkan	24 produk	6 produk	-	6 produk	123,861,500	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	6 produk	136,247,650	Disdukcapi

	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	80 laporan		-	20 laporan	29,102,000	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	20 laporan	32,012,200	Disdukcakil
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	70 laporan		-	10 laporan	94,759,500	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	15 laporan	104,235,450	Disdukcakil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase peningkatan stakeholder yang mendapatkan hak akses data kependudukan	100 #REF!	92.10%	94%	40 %	213,877,000	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	60 %	235,264,700	Disdukcakil
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	71,885,900	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	12 laporan	79,074,490	Disdukcakil
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	48 laporan	6 laporan	12 laporan	12 laporan	36,500,000	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	12 laporan	40,150,000	Disdukcakil
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	20 Dokumen	-	-	5 Dokumen	35,385,900	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	5 Dokumen	38,924,490	Disdukcakil
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	20 buku	-	1 Dokumen	88,000,000	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	1 Dokumen	96,800,000	Disdukcakil
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 laporan	-	-	1 laporan	23,000,000	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	1 laporan	25,300,000	Disdukcakil
	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	80 Dokumen	20 buku	10 buku	20 Dokumen	65,000,000	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	20 Dokumen	71,500,000	Disdukcakil
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 laporan	1 pekon	1 pekon	2 laporan	53,991,100	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	1 laporan	59,390,210	Disdukcakil
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 laporan	1 pekon	1 pekon	2 laporan	53,991,100	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	1 laporan	59,390,210	Disdukcakil
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data Perkembangan Kependudukan yang sesuai dengan hasil konsolidasi kemendagri	100 %	1	-	100 %	49,933,000	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	100 %	54,926,300	Disdukcakil
	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	200 buku	50 buku	50 buku	40 Dokumen	49,933,000	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	50 buku	54,926,300	Disdukcakil
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	200 buku	50 buku	50 buku	40 Dokumen	49,933,000	Kecamatan Balik Bukit	DID			Masyarakat	50 buku	54,926,300	Disdukcakil
TOTAL							5,292,223,510							5,821,445,861	

Catatan :
Batasan Pagu yang di berikan sebesar Rp. 4.750.000.000,- terjadi penambahan sebesar Rp. 542.223.510 pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan. Sehingga pagu total menjadi Rp. 5.292.223.510,-